

## **PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI**

Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi <sup>1</sup>

Made Heny Urmila Dewi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### **ABSTRAK**

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan upaya pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi sangat didukung oleh penerimaan daerah dan infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini diantaranya ; (1) untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; (2) untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali; (3) untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi dari pengaruh belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 81 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) belanja daerah dan infrastruktur secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali; 2) belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan infrastruktur tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, 3) pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel mediasi pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

**Kata Kunci** : *kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, infrastruktur, analisis jalur.*

### **ABSTRACT**

*Community welfare one of goals expected each region, including districts / cities in Bali Province. One of the efforts made by the government to improve people's welfare is development efforts. Success of economic development is strongly supported by regional revenues and infrastructure. The purpose this study; (1) analyze the effect of regional spending and infrastructure development on economic growth in the Regency / City Bali Province; (2) analyze the effect of regional spending and infrastructure development on the welfare of the community in the Regency / City Bali Province; (3) analyze economic growth as a mediating variable effect of regional spending and infrastructure development on people's welfare. Data used are secondary data, total 81 observations. Analysis technique used path analysis. The results showed 1) regional spending and infrastructure directly have positive effect on economic growth in regencies / cities of Bali Province; 2) regional spending and economic growth have significant positive effect on people's welfare, while infrastructure haven't positive effect on people's welfare, 3) economic growth not a mediating variable for the effect of regional spending on the welfare of the people in the regencies / cities of Bali Province.*

*Keywords: community welfare, economic growth, regional spending, infrastructure, path analysis.*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan, (Pratama, 2019). Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun (Arsyad, 2010). Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pertumbuhan ekonomi dan proses pemerataan perekonomian (Putra 2018). Pembangunan ekonomi merupakan tanda adanya peningkatan perekonomian sebuah daerah.

Otonomi daerah telah ditetapkan Indonesia sejak awal bertujuan untuk memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian yang dapat membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan setiap daerah (Nehen, 2010;282). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu upaya pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah dalam mengurus, mengatur dan mengelola sendiri rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip otonomi daerah (Maryati dan Endrawati, 2010). Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien, potensi maupun karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah (Syukri, 2019). Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi]  
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif (Aceng, 2018).

APBD merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja pemerintah. Belanja pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. APBD disusun oleh suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya APBD, maka suatu daerah dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan daerah setempat (Marunta, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, “belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota”. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Deswantoro, dkk 2017). Berdasarkan sifat ekonominya, belanja daerah terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang; subsidi; serta hibah dan bantuan sosial. Berdasar fungsinya, belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum; peningkatan kesehatan; pariwisata; budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat (publik) (Rustariyuni, 2014).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti, sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif (Ida, 2017). Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya penerimaan daerah (pajak dan restribusi) yang akan diterima. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali (Fadly, 2016).

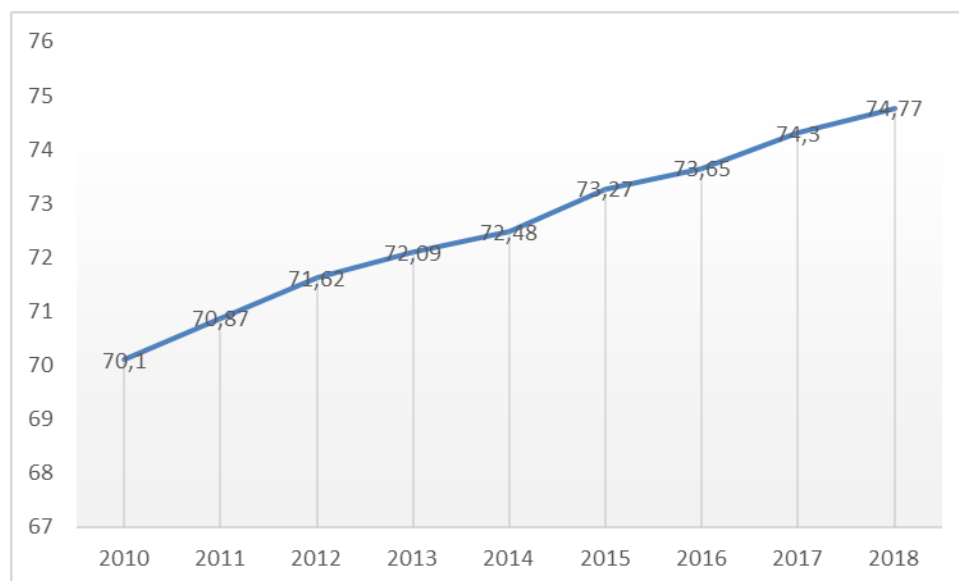
Pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, membutuhkan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut terdapat ketentuan, yaitu memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang jelas dan luas

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi] serta bertanggung jawab secara proporsional dibidang pendapatan daerah yang diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan potensi sumber daya, guna membiayai otonomi daerah sesuai dengan tingkatan daerah otonom.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah dapat dilakukan dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar guna menunjang kepentingan publik. Saat ini penggunaan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas diseluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Pembangunan manusia dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia dari sisi daya beli, kesehatan maupun pendidikan (Nehen, 2012). Pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia, dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang meningkat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) merupakan cara yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang penggunaannya dapat diterima di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan sehat dipersentasikan oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dipersentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara dimensi kehidupan yang layak dipersentasikan oleh indikator kemampuan daya beli (Novita, 2017). Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Pembangunan tiga aspek yang menjadi fokus perhatian dalam penghitungan

IPM tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan sinergi di antara ketiganya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Anand, dalam Rustariyuni, 2017). Angka IPM di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan dari tahun 2010-2018 seperti ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali periode 2010-2018 (poin)**

*Sumber : BPS Provinsi Bali 2019*

Secara nasional indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Bali menduduki peringkat 4 (empat) pada tahun 2018 (BPS, 2019). Nilai indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan dari angka 70.1 poin di tahun 2010 hingga 74,77 poin di tahun 2018. Namun masih terdapat tiga kabupaten yang memiliki angka IPM di bawah Provinsi Bali pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Klungkung, Bangli dan Karangasem. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) di ketiga kabupaten berada pada kisaran 60-70 poin. Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 sebesar 70,90 poin, Kabupaten Bangli

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi] sebesar 68,96 poin dan kabupaten Karangasem sebesar 66,49 poin. Capaian itu tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Jembrana pada tahun 2018 sebesar 71,65 poin, Kabupaten Tabanan 75,45 poin, Kabupaten Badung 80,87 poin, Kabupaten Gianyar 76,61 poin, Kabupaten Buleleng 71,70 poin, dan Kota Denpasar 83,30 poin.

Pelaksanaan desentralisasi dalam mencapai keberhasilan otonomi daerah tentunya mengharapkan terwujudnya suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat penduduk sejahteranya relatif banyak dibandingkan daerah lainnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di daerah, maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Luqman dkk, 2011). Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan meningkat. Untuk itu diperlukan tenaga kerja yang semakin banyak dalam memproduksi barang/jasa tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat (Ambok, 2018).

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia (IPM) sangat tergantung pada komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang sarana dan prasarana (Rustariyuni, 2014). Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi salah satunya diperlukan adanya pembangunan dibidang infrastruktur. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur. Mengingat gerak laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan bertambahnya infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur, pemerintah memberikan dukungan dengan memberikan kompensasi dalam bentuk kerja sama, subsidi, garansi dan penghapusan pajak sebagaimana yang dicantumkan dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2005. Pemerintah saat ini telah mengambil pendekatan yang sangat berbeda dan jauh lebih sederhana untuk mendorong agenda infrastrukturnya dengan fokus pada pembangunan jangka pendek, memperluas anggaran dan menyuntikkan sejumlah besar dana anggaran ke dalam infrastruktur (David and Lily, 2016). Perjalanan pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan berbagai macam perubahan terutama struktur perekonomian.

Tingkat pertumbuhan sektoral perlahan mengalami pergeseran dari kegiatan pertanian menuju ke non pertanian dan pergeseran terjadi pada sektor industri ke sektor jasa. Pembangunan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai salah satu pengambil kebijakan. Berdasarkan konsep pembangunan, terkandung makna-makna alokasi sumber daya, regulasi dan pemberdayaan masyarakat.



Proses pembangunan yang terjadi dapat memperluas akses publik untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses fasilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, keamanan dan lain-lain) (Maqin, 2011).

Keterkaitan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi bahwa tercakup dalam pengertian infrastruktur adalah aspek fisik dan finansial yang terkandung dalam jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan bentuk-bentuk sarana transportasi dan komunikasi ditambah air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya. Tingkat ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Ketidacukupan infrastruktur merupakan salah satu penghambat pembangunan ekonomi. Energi listrik merupakan kunci bagi banyak kegiatan ekonomi baru (Raksaka, 2012). Keterbatasan infrastruktur menyebabkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada tidak akan terdorong melakukan ekspansi dari investor dan investor baru juga tidak tertarik melakukan investasi yang selanjutnya akan mempengaruhi Produk Domestik Bruto Regional Bruto yang mana mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Paulus, 2019)

Ketimpangan pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Untuk mencegah ketimpangan antar kabupaten/kota, pemerintah Provinsi Bali tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan kawasan Bali Selatan dengan Bali Utara dan Barat. Jalan ini diharapkan mampu memberi pengaruh bagi pemerataan dan pendapatan kabupaten kawasan utara dan selatan. Keberadaan jalan bebas hambatan diharapkan mampu menarik minat investor untuk berinvestasi ke kawasan utara dan barat. Upaya tersebut sudah dimulai oleh Bappeda Bali tahun 2008 dengan membuat

kajian *Detail Engineering Desain* (DED). Infrastruktur jalan berperan penting dalam merangsang maupun mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Karena itu setiap Negara melakukan investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. Kemacetan yang menjadi permasalahan penting bagi sebagian besar masyarakat Bali sebagai akibat porsi jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan sarana infrastruktur jalan. Panjang jalan menurut Kabupaten/Kota dan status di Bali, 2018 ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Status di Bali, 2018**

Kabupaten/Kota	Status Jalan			Jumlah
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	
Jembrana	72,63	29,48	1 075,93	1 178,04
Tabanan	65,73	136,72	872,72	1 075,17
Badung	63,62	61,18	1 950,80	2 075,60
Gianyar	64,33	85,52	515,24	665,09
Klungkung	37,71	9,34	453,82	500,87
Bangli	21,19	125,14	905,81	1 052,14
Karangasem	97,97	145,98	1 202,55	1 446,50
Buleleng	156,34	106,65	999,96	1 262,95
Denpasar	49,88	43,33	486,08	579,29
<b>Provinsi Bali</b>	<b>629,39</b>	<b>743,34</b>	<b>8 462,91</b>	<b>9 835,65</b>

*Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019*

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2018 panjang jalan nasional di Bali mencapai 629,39 km, jalan provinsi 743,34 km, jalan kabuapten/kota 8,462 km. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan otomatis akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Sistem jalan yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara maupun daerah untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan produk, mengembangkan industri, mendistribusikan populasi serta meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan yang terjadi di masyarakat menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi] menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat (Oka dan Arka 2015). Keterbatasan jaringan jalan dapat menghambat pertumbuhan suatu wilayah sehingga aktivitas perekonomian dapat terganggu yang pada akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya harga suatu barang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rustariyuni, 2017 dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh secara langsung pada indeks pembangunan manusia pada 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian lainnya, yaitu oleh Priambodo (2015) bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara belanja pegawai, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Namun hasil berbeda didapatkan dalam penelitian Suryati (2015) yang menunjukkan hubungan negatif antara belanja pegawai terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Selanjutnya dalam penelitian Warsilan (2015) menyatakan bahwa Infrastruktur kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Samarinda. Awandari dan Indrajaya (2016) menyatakan bahwa Infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Rasmusi dan Dita (2018) menyatakan bahwa Infrastruktur jalan, air, dan pendidikan berpengaruh simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh belanja daerah, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi dari

pengaruh belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Peneliti akan melakukan eksperimen untuk mengetahui hubungan beberapa variabel yaitu pengaruh langsung variabel belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung belanja daerah, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat serta pengaruh tidak langsung dari belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Titik pengamatan dalam penelitian ini ada di sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 8 tahun (2010 sampai 2018) maka besarnya ukuran sampel adalah  $9 \times 9 = 81$  pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*). Hubungan variabel tersebut di jelaskan melalui kerangka konseptual yang ada.

Hutabarat (2013), membuktikan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Selain itu, dalam penelitian Deswanto, dkk 2017 menyatakan bahwa belanja modal, belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian lainnya oleh Putri dan Cahyono, 2012 menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Kemudian, diantara struktur belanja APBD, belanja modal merupakan output yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya pembangunan manusia.

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi]

Belanja modal yang memiliki sifat berupa aset tetap dan bermanfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat karena manfaatnya yang dapat mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan.

Belanja hibah yang diberikan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, dan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pane, 2011). Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Priambodo (2015) dan Hendarmin (2012) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

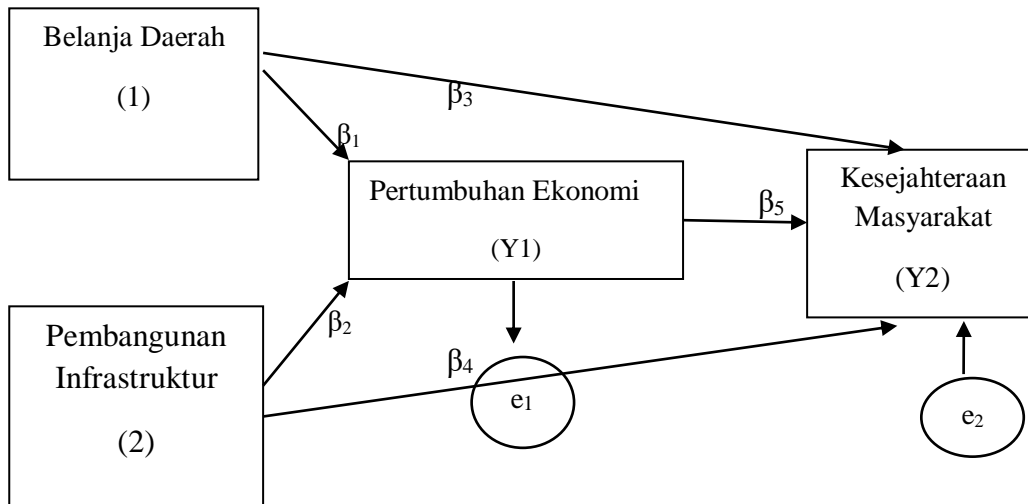
Infrastruktur ekonomi terdiri dari panjang jalan, listrik, air dan saluran irigasi mempunyai peran penting sebagai pendorong sektor-sektor lain dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Berdasarkan penelitian Atmaja dan Mahalli menyatakan bahwa infrastruktur jalan dan air memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur listrik dan telepon memiliki pengaruh yang negatif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peran infrastruktur penting guna menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dengan daerah penyangganya. Di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di lereng-lereng gunung atau lembah, biasanya penduduknya hidup dalam kemiskinan dan terisolasi dari gerak maju

pembangunan di pusat pertumbuhan terdekat sekalipun. Pembangunan infrastruktur dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan meningkatkan akses bagi kaum miskin dan akses bagi intervensi pemerintah untuk lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan bagi kaum miskin untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian Kurniawan (2014) mengenai pengaruh jalan terhadap kesejahteraan masyarakat, menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kondisi pemukiman jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan disuatu wilayah. Peningkatan kualitas pemukiman jalan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan penduduk. Penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2016) menyatakan bahwa Infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali. Peranan infrastruktur sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai efek pengganda dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi (Tatan, 2018).

Perencanaan yang matang dalam sebuah upaya pembangunan menjadi unsur yang penting demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Menurut Oka dan Arka (2015) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali melalui disparitas pendapatan antar daerah, atau dengan kata lain disparitas pendapatan antar daerah merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan ,masyarakat Provinsi Bali.

Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2010) dan Priambodo (2015) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Fatmasari (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan.



**Gambar 2 Model Analisis Jalur Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (2)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

- $X_1$  = Belanja Daerah
- $X_2$  = Pembangunan Infrastruktur
- $Y_1$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $Y_2$  = Kesejahteraan Masyarakat
- $e_1, e_2$  = *error* (variabel pengganggu)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Jalur (*Path Analysis*)

#### Pengaruh Belanja Daerah dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

(a) Persamaan regresi substruktural I :

Berdasarkan persamaan substruktural I dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel belanja daerah dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_1 = 0,234_1 + 0,115_2 + e_1 \quad F = 2,698$$

$$S_b = (0,000) \quad (0,000) \quad R^2 = 0,065$$

$$t = (2,132) \quad (1,047)$$

$$\text{Sig} = (0,036) \quad (0,298)$$

(b) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural I :

**Tabel 2 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural I**

Regresi	Koef. Reg. Standar	T hitung	P. Value/sig	Keterangan
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,234	2,132	0,036	Positif (Signifikan)
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,115	1,047	0,298	Positif (tidak signifikan)

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

$X_1$  : Belanja Daerah

$X_2$  : Pembangunan Infrastruktur

$Y_1$  : Pertumbuhan Ekonomi

Nilai *standardize coefficient* beta variabel belanja daerah sebesar 0,234 dan nilai signifikansi sebesar  $0,036 < 0,05$  (nilai alpha) ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak,  $H_0$  ditolak.

Hal ini berarti bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Nilai *standardize coefficient*

beta variabel infrastruktur sebesar 0,115 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,298 > 0,05$  (nilai alpa), ini berarti bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti bahwa



Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi]  
 pembangunan infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

**Pengaruh Belanja Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

(1) Persamaan regresi substruktural II

Berdasarkan persamaan substruktural II dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung variabel belanja daerah, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Adapun persamaan regresi ditunjukkan sebagai berikut.

$$Y_2 = 0,469_1 - 0,208_2 + 0,437Y_1 \quad F = 30,245$$

$$S_b = (0,000) \quad (0,001) \quad (0,756) \quad R^2 = 0,541$$

$$T = (5,899) \quad (-2,674) \quad (5,472)$$

$$Sig = (0,000) \quad (0,009) \quad (0,000)$$

(2) Pengujian signifikansi persamaan regresi substruktural II

**Tabel 3 Ringkasan Koefisien Jalur Substruktural II**

Regresi	Koef. Reg. Standar	T hitung	P. Value/sig	Keterangan
X <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	0,469	5,899	0,000	Positif (Signifikan)
X <sub>2</sub> → Y <sub>2</sub>	-0,208	-2,674	0,009	Negatif(signifikan)
Y <sub>1</sub> → Y <sub>2</sub>	0,437	5,472	0,000	Positif (signifikan)

Sumber : Lampiran 3

Keterangan :

X<sub>1</sub> : Belanja Daerah

X<sub>2</sub> : Pembangunan Infrastruktur

Y<sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi

Y<sub>2</sub> : Kesejahteraan Masyarakat

Nilai *standardize coefficient beta* variabel belanja daerah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,469 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (nilai alpha) berarti H<sub>1</sub> diterima. Hal ini berarti bahwa belanja daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

di kabupaten/kota Provinsi Bali. Nilai *standardzise coefficient beta* variabel pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar -0,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 (nilai alpha) berarti  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur secara langsung tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Nilai *standardzise coefficient beta* variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,437 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (nilai alpha) berarti  $H_1$  diterima. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Langsung Variabel**

#### **Pengaruh langsung Belanja Daerah ( $Y_1$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *standardzise coefficient beta* sebesar 0,234 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05 (nilai alpha) berarti  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali salah satunya dipengaruhi oleh belanja daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Cahyono (2012), yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Pengeluaran pemerintah berkaitan erat dengan APBD karena secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan-pembiayaan

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi]  
daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Amrie, dkk (2019) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur berdasarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori hubungan belanja daerah terhadap PDRB dapat dibuat rumus  $Y = C + I + G$ . Artinya bila pengeluaran pemerintah bertambah maka pendapatan (Y) akan meningkat.

### **Pengaruh langsung Pembangunan Infrastruktur (2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y<sub>1</sub>) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *standardzise coefficient beta* sebesar 0,115 dengan nilai signifikansi sebesar 0,298 lebih besar dari 0,05 (nilai alpha) berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Koefisien regresi bertanda positif menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan infrastruktur menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh dalam menunjang kegiatan ekonomi, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja dan sektor manufaktur, sehingga kenaikan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga berpengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik oleh Adam Smith menyatakan fungsi pemerintah dalam mendukung perekonomian salah satunya adalah menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti infrastruktur dan fasilitas umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sumadiasa, dkk (2016), yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Provinsi Bali tahun 1993-2014. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Maqin (2011) yang menyatakan bahwa infrastruktur jalan mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat namun tidak signifikan. Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan dapat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu tempat. Infrastruktur jalan yang baik dan memadai akan mengurangi biaya transaksi dan distribusi perekonomian akan lebih efisien yang pada akhirnya harga barang di pasar akan lebih kompetitif.

#### **Pengaruh langsung Belanja Daerah ( $Y_1$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *standardize coefficient beta* sebesar 0,469 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (nilai alpha) berarti  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja daerah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pengeluaran daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengeluaran Adolf Wagner yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang dapat diukur dengan IPM.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau negara dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kemampuan suatu daerah untuk memberikan kehidupan secara layak bagi masyarakatnya tergantung pada rata-rata jangka panjang pertumbuhan ekonominya. Hasil penelitian ini sejalan dengan

Pengaruh Belanja Daerah .....[Ni Wayan Diah Mia Kusuma Dewi, Made Heny Urmila Dewi]  
penelitian Deswantoro, dkk (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Priambodo (2015) yang menyatakan bahwa belanja daerah, belanja modal dan belanja pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Pulau Jawa.

Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan, dan lainnya), penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak (Priambodo, 2015). Pembangunan infrastruktur akan menimbulkan kesempatan kerja di masyarakat, sehingga akan memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi. Selain itu, belanja modal yang memiliki sifat berupa aset tetap dan bermanfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat.

### **Pengaruh langsung Infrastruktur (2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y<sub>2</sub>) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *standardize coefficient beta* sebesar -0,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 kurang dari dari 0,05 (nilai alpha) berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Hal ini berarti bahwa infrastruktur tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang dirumuskan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Kusharjanto dan Kim, (2011) serta Tachiwou (2011) yang menyatakan

bahwa infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tachiwou (2011) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan elemen kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs), khususnya MDG satu yaitu pengurangan dan kemiskinan dan MDG tujuh yaitu ketahanan lingkungan. Kelengkapan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil infrastruktur jalan tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Dilihat dari kondisi permukaannya, jalan dengan kondisi baik di Provinsi Bali mencapai 826,50 km (60,21%), yang tergolong kondisi sedang mencapai 392,95 km (28,62%), dan kondisi rusak mencapai 153,34 km (11,17) (Provinsi Bali Dalam Angka 2019 : 391). Tersedianya infrastruktur dengan kondisi yang baik memberikan keunggulan bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produknya, mempermudah mobilitas penduduk, mengembangkan industri serta meningkatkan pendapatan yang secara langsung berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Silvia dkk (2013) penyediaan dan perbaikan terhadap infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Abdullah, (2014) dalam penelitiannya menyatakan infrastruktur jalan yang baik, menciptakan aksesibilitas bagi masyarakat dalam menggerakkan perekonomian. Aksesibilitas sebagai proses percepatan terhadap ekonomi baik dalam skala local maupun skala nasional.

**Pengaruh langsung Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y_2$ ) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh nilai *standardize coefficient beta* sebesar 0,437 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (nilai alpha) berarti  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pembangunan ekonomi Rostow yang membagi proses pembangunan menjadi lima tahap pembangunan yaitu masyarakat tradisional, tahap prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan dan tahap masa konsumsi tinggi (Arsyad, 2010:62). Rostow menyatakan bahwa prasyarat agar bisa lepas landas, suatu negara harus dapat membangun pertanian, industri dan perdagangannya, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka perhatian masyarakat bukan lagi pada masalah produksi melainkan dapat lebih fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat (Utami dan Indrajaya, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setyowati (2012) dan Wijayanti dan Darsana (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hal ini menandakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari besaran PDRBnya. Semakin tinggi tingkat PDRB, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih layak akan meningkat atau dengan terciptanya peningkatan

pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mengalokasikan penghasilannya di sektor pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup masyarakat, yang akhirnya menjamin kemakmuran masyarakat, meningkatkan taraf kesehatan, keharmonisan serta kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Tidak Langsung**

#### **Pengaruh Tidak Langsung Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali**

Berdasarkan hasil z hitung yaitu sebesar  $0,578 < 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh belanja daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

#### **Pengaruh Tidak Langsung Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil z hitung yaitu sebesar  $0,578 < 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

### **SIMPULAN**

- 1) Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Infrastruktur berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan infrastruktur tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/ kota Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi bukan sebagai



variabel mediasi pengaruh belanja daerah dan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali.

## **SARAN**

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kesedian infrastruktur sangat berpengaruh dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur jalan, dapat memudahkan akses masyarakat dalam kegiatan perekonomian dan memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber daya yang tersedia. Kenaikan infrastruktur di kabupaten/kota Provinsi Bali dalam penelitian ini belum menunjukkan hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya infrastruktur jalan yang kurang baik di beberapa daerah. Untuk meningkatkan peranan infrastruktur terhadap kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata di setiap pemerintahan daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan fiskal; antara pusat dan daerah. Pembangunan yang merata pada setiap daerah akan berdampak pada ekonomi masyarakat dalam memperoleh akses ekonomi, pergerakan ekonomi yang cepat dan berkembang dan akses transportasi yang meningkat seiring dengan infrastruktur yang baik. Ekonomi masyarakat akan terbangun secara sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai penguatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **REFERENSI**

- Aceng Abdul Hamid, 2018. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat. *Jurnal Sekuritas*, Volume 1, Nomor 4, Issn : 2581-2777
- Aleiou, Constantinous. 2009. *Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE)*. *Journal of Economic and Social Research*.

- Ambok Pangiuk. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013. *Itizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2.
- Amrie, Al Machmud, dkk. 2019. Pengaruh Belanja Daerah Serta Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Kaltara*. Diakses pada 20 Oktober 2020.
- Aryanto, Rudi. 2011, Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol.8 No.1.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics, University of Queensland.
- Cooray, Arusha. 2009. *Government Expenditure, Governance and Economic Growth*. [www.palgrave-journals.com/ces/](http://www.palgrave-journals.com/ces/).
- David and Lily. 2016. *Addressing Indonesia's Infrastructure Deficit*. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52, No. 1. ISSN: 0007-4918.
- Fadly, Faishal. 2016. Adakah Pengaruh Pertumbuhan ekonomi Terhadap Pendapatan Asli daerah?. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*. Vol. 16, No 2, ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851.
- Faridi, Muhammad Zahir. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)* Vol. 31, No. 1.
- Feli, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. *Journal of Accounting and Taation*.
- Garcia, Jorge dan Lana Soelistianingsih. 1998. Why Do Differences in Provincial Incomes Persist in Indonesia?. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 34 No. 1
- Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol.9 No.1. ISSN : 2301 – 8968.
- Karim, Kefi Mohamed. 2012. Democracy, Investment and Economic Growth. *Journal International of Economic and Financial Issues*. Vol.2, No.3.
- Kusharjanto, Heru dan Kim, Donghun. 2011. Infrastructure and Human Development : The Case Of Java Indonesia. *Kournal of the Asia Pasific Economi*. Vol. 16 (1).
- Luqman, Khakim, Iwan Hermawan, Achmad Solechan, dan VS Tripriyo PS. 2011. Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12, Nomor 2
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49.
- Mahendra dan Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.3 : 863-877. ISSN : 2302 – 8556.
- Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Vol:2. No.2
- Mesak. 2013. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di

- Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol.6 No.1.ISSN : 2301 – 8968.
- Olatunji,O.C., O. Asaolu Taiwo and J.O. Adewoye. 2009. A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government : A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*. Vol.3.
- Ogujiuba, Kanayo and Abraham, Terfa W. 2012. Testing the Relationship between Government Revenue and Ependiture: Evidence from Nigeria. *Journal International of Ecconomic Finance*. Vol.4.
- Oka dan Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali.*Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*Vol.8 No.1.ISSN : 2301-8968
- Pere, Engjell. The Impact of Good Governance in the Ecconomic Development of Western Balkan Countries. *European Journal of Government and Economics*. Vol.4 No.1
- Peggy dan Ayu. 2015. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*Vol.8 No.1. ISSN : 2301 – 8968
- Paulus Iriyena1, Amran T. Naukoko 2,Hanly .F. Dj. Siwu.2019. Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan TerhadapPertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kaimana2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 19 No. 02.
- Ping, in-Qiao and Jie Bai. 2005. Fiscal Decentralization Local Public Good rovision in China. *Economic Research*.
- Priambodo, Anugrah. 2015. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Skrips*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. Diakses Pada 20 Oktober 2020
- Raksaka and Suahasil.2012. *Survey Of Recent Developments*. *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 48, No. 1. ISSN: 0007-4918
- Rezzy. 2019. Pemodelan Regresi Panel Pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*Vol.12 No.1.ISSN : 2301 – 8968
- Rusmusi dan Dita.2018.Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan, Air, Dan Pendidikan TerhadapPertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* Volume 20 No. 03.
- Rustariyuni, Surya Dewi.2014. Pengaruh Gini Ratio, Penge Luaran Non Makanan Perkapita,Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada IndeksPembangunan Manusia Kabupaten /KotaDi Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Jurnal Piramida*. Vol. No.1 : 44-45. ISSN :